



LAPORAN KINERJA (LAKIP) 2018



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2018 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Februari 2019
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



H. RADIUS AKIMA, S.Sos, MT
NIP. 19710522 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	6
B. Perjanjian kinerja tahun 2018	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	9
B. Analisis Kinerja	10
C. Realisasi Anggaran	14
D. Analisis Efisiensi	15
PENUTUP	
LAMPIRAN :	
- STRUKTUR ORGANISASI	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas Secara Teknis Operasional Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah diantaranya:

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2018 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2018, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat 3 (Tiga) sasaran dan terdapat 7 (Tujuh) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2018.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai. dari 7 (Tujuh) indikator kinerja sebagian besar sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 2 (Dua) indikator yang belum terpenuhi yakni indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Indikator Prosentase tindak lanjut hasil Inspektorat/BPK hal ini dikarenakan belum dilaksanakan kegiatan audit oleh BPK.

Keberhasilan pencapaian berbagai indicator kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja sama

segenap jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2019, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKJ dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis LKJ menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKJ tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2018. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Pokok :

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, serta mewujudkan pelayanan yang prima Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkalis.

b. Fungsi :

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan.
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

c. Tujuan :

1. Terciptanya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan sidang/rapat untuk menghasilkan produk-produk legislasi yang bermutu terhadap kehidupan masyarakat;
2. Tercapainya sistem pelaksanaan pemantauan/pengawasan Dewan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan;
3. Tercapainya hasil-hasil konsultasi/koordinasi yang dilakukan oleh Dewan untuk memperoleh pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat;
4. Terwujudnya tertib administrasi dalam rangka pengelolaan keuangan/anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
5. Tersedianya dukungan administrasi, perlengkapan, sarana prasarana dan urusan rumah tangga yang akurat;
6. Tercapainya kualitas SDM Dewan dan SDM Staf sekretariat DPRD yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

d. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan kedudukan tersebut Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselon, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, berikut ini :

1. Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
 - a. Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan administrasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bagian umum, bagian keuangan, bagian persidangan, bagian humas dan protokoler, dalam rangka mendukung dan melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Umum mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Sub Bagian yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub Bagian Rumah tangga dan Sub Bagian Perlengkapan dan Aset. Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan

- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Setwan.
 - c. Pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan serta penataan aset.
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi.
 - e. Pelaksanaan urusan Hukum dan Organisasi
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Setwan.
4. Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Sub Bagian yang meliputi Sub Bagian Anggaran dan Perencanaan, Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Pembukuan, Pembendaharaan dan Pelaporan. Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan anggaran DPRD dan Setwan serta penyusunan perubahan anggaran DPRD dan Setwan
 - b. Pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan anggaran DPRD dan Setwan
 - c. Penyusunan perhitungan anggaran DPRD dan Setwan
 - d. Penyiapan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan
 - e. Verifikasi pelaksanaan anggaran DPRD dan Setwan
 - f. Pelaksanaan administrasi pembayaran penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, penghasilan pegawai dan atas pelaksanaan program dan kegiatan
 - g. Pelaksanaan administrasi pembukuan keuangan
 - h. Penyusunan Laporan Keuangan DPRD dan Setwan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekwan
5. Bagian Persidangan mempunyai tugas pengkoordinasian sub bagian yang meliputi Sub Bagian Persidangan, Sub Bagian Risalah dan Sub Bagian Perundangan-undangan dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Rencana dan Program lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan
 - b. Penyusunan Petunjuk teknis lingkup persidangan, risalah dan perundang-undangan

- c. Pelaksanaan lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan
 - d. Penyusunan rancangan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat
 - e. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan lingkup persidangan, risalah dan Perundangan-undangan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan.
6. Bagian Humas dan Protokoler mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Sub Bagian Protokoler, Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi serta Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi. Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan.
 - b. Penyusunan Petunjuk teknis hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan.
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekwan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penetapan kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen serta usaha-usaha untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan dikelola suatu organisasi.

Sementara **Penetapan Kinerja** bertujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas;
- b. Transparansi, dan kinerja aparatur;
- c. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- d. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi;
- e. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai pemberian penghargaan/reward dan sanksi.

Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada. Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis serta RPJMD Tahun 2016-2021 oleh karena itu Indikator Kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Persentase kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	75 %
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	75 %
	Persentase fasilitasi rapat rapat dewan tepat waktu	75 %
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Indeks kepuasan masyarakat	75 %
	Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	75 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas kinerja	B (60)
	Persentase temuan inspektorat /BPK yang ditindaklanjuti	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Persentase kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	80 %	82%	103 %
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	80 %	85%	106, 25 %
	Persentase fasilitasi rapat rapat dewan tepat waktu	80 %	75%	94 %
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Indeks kepuasan masyarakat	80 %	75%	94 %
	Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	80 %	75%	94 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas kinerja	B(60)	CC(50)	83.33%
	Persentase temuan inspektorat /BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

Dari gambaran Tabel Sasaran dapat diketahui bahwa kuantitas dari sasaran tersebut telah dapat dipenuhi secara optimal.

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan dari 3 sasaran 7 indikator tersebut seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

“Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD”

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	75 %	80 %	82%	103 %	96,47%
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	75 %	80 %	85%	106,25 %	100%
Persentase fasilitasi rapat rapat dewan tepat waktu	75 %	80 %	75%	94%	88,23%
Rata-rata Capaian				101,08%	95%

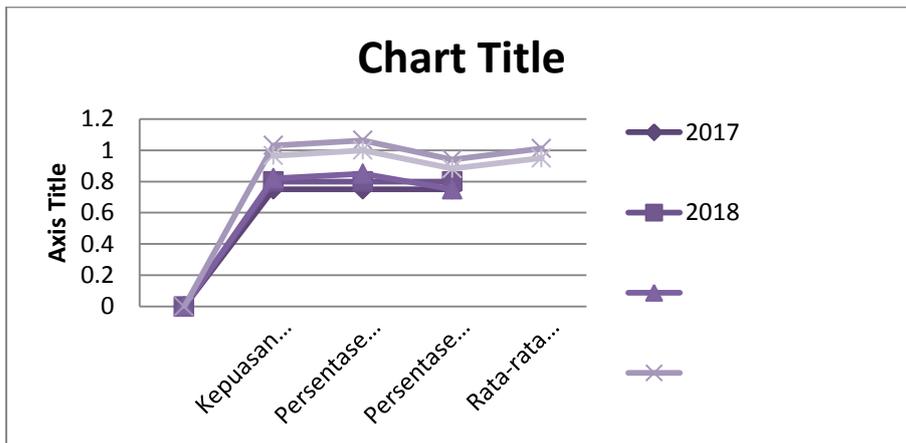
dari tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa tingkat capaian dari 3 indikator kinerja untuk Tahun 2018 sudah cukup baik dan telah melebihi target kinerja ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,08 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

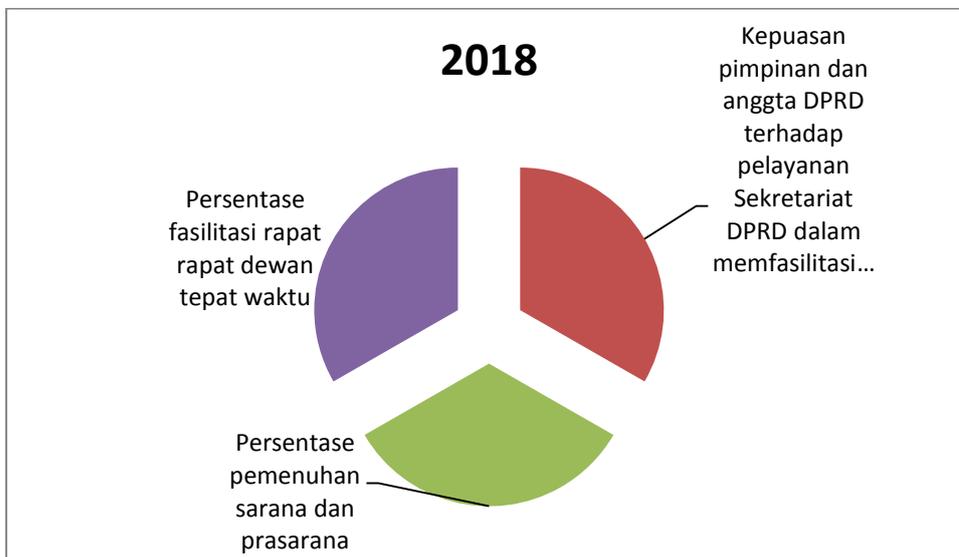
Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada

Sekretariat DPRD Tahun 2018 dimana suatu sasaran dapat memuat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut dan Tidak ada Permasalahan/Hambatan yang sangat signifikan yang dialami karena diatur sesuai dengan ketentuan dan tupoksi masing masing staff.

Gambaran Grafik



Capaian Kinerja Uraian dan Analisis Mengenai capaian sasaran dan indicator



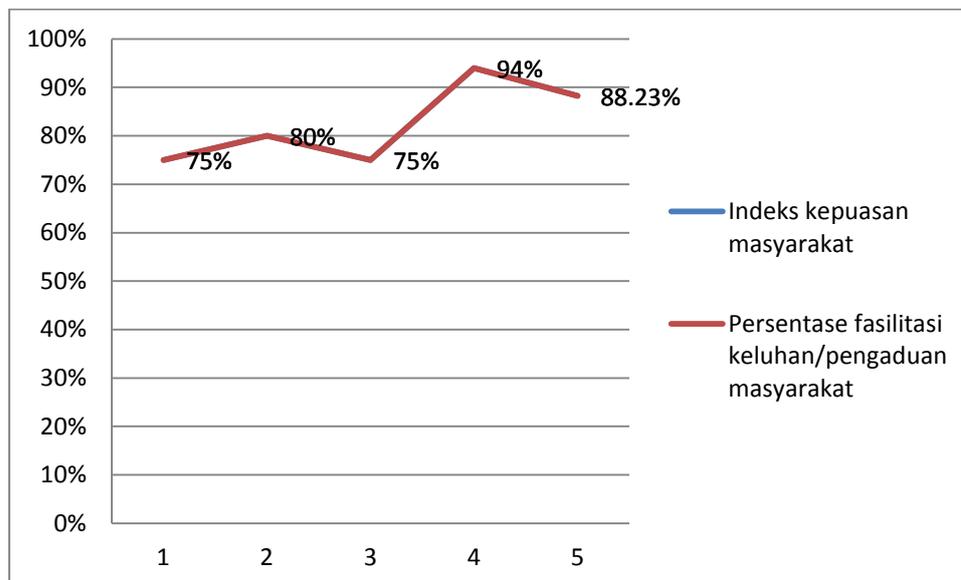
Sasaran 2

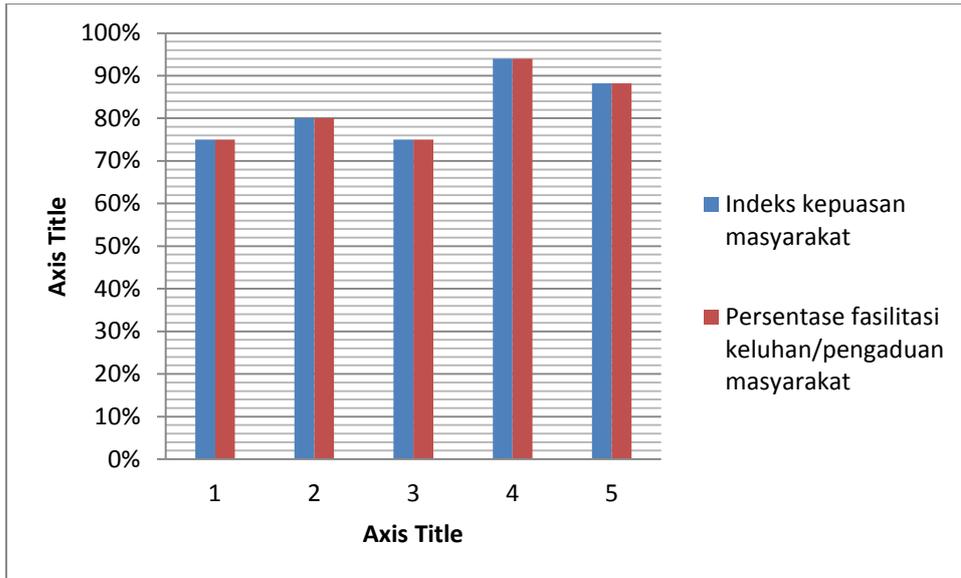
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan “

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks kepuasan masyarakat	75%	80 %	75%	94%	88,23%
Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	75%	80 %	75%	94%	88,23%
Rata-rata Capaian				94%	88,23%

Tingkat capaian realisasi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan indikator Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 75 % dari target tahun 2018 sebesar 80 %. Rata-rata Capaian kinerja pada indikator ini sudah cukup baik yaitu sebesar 94 % walaupun masih dibawah target yang telah ditetapkan, namun diharapkan adanya peningkatan capaian kinerja yang optimal sampai dengan tahun 2021.

Lampiran grafik





Sasaran 3

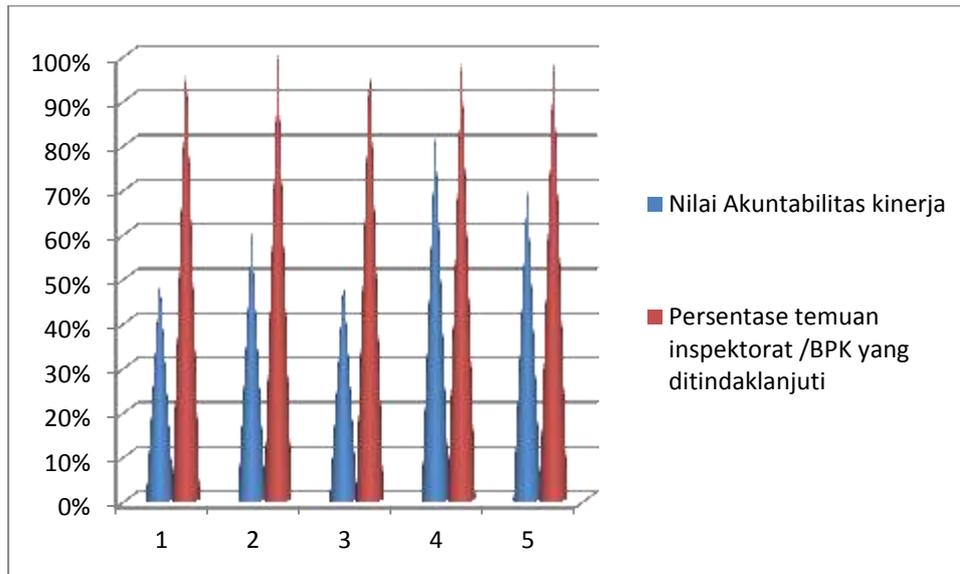
“Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD “

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Akuntabilitas kinerja	CC (50)	B(60)	CC(50)	83.33%	71.42%
Persentase temuan inspektorat /BPK yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				91.7%	86%

Lampiran grafiks



Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD



Pada sasaran ketiga **Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD** dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi pada indikator nilai Akuntabilitas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 memperoleh nilai atau Kategori CC, sedangkan untuk tahun 2018 pada indikator nilai akuntabilitas kinerja belum ada realisasinya karena masih dalam tahap asistensi penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis. Diharapkan untuk indikator penilaian Nilai Akuntabilitas kinerja Tahun 2018 realisasi kinerja bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Presentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti untuk tahun 2018 realisasinya mencapai 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 adalah sebesar **Rp 58.678.608.568,00 (Lima puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)** atau setara **86,53%** dari pagu sebesar **Rp. 67.807.131.948,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)** Ada pun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran ke 2 tentang Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan yaitu sebesar 94%, Sementara penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran ke 1 tentang Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan

pimpinan dan anggota DPRD yaitu 94%. adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran ke 2. dan adapun penyerapan terkecil pada sasaran ke 1 dan ke 3.

Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2018 sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	101,08%	26.772.604.348	22.348.953.922	83%
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	94%	9.092.613.000	8.602.532.435	94%
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	86%	31.161.066.400	26.904.601.787	86%

D. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	101,08%	83%	18.08%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	94%	94%	-
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	86 %	86%	-

PENUTUP

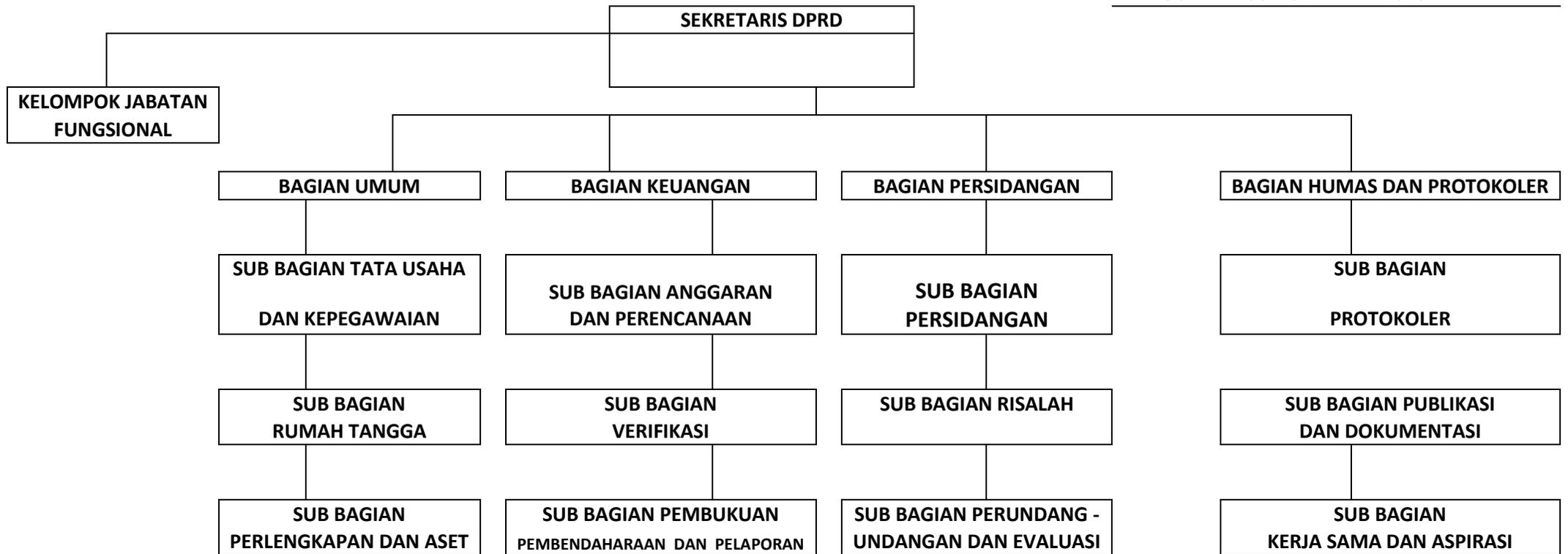
Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2018 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis telah dicapai. Yaitu dari 7 (Tujuh) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi, Hanya 2 (Dua) indikator yang belum terpenuhi yakni indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Indikator Presentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti hal ini dikarenakan belum dilaksanakan kegiatan audit oleh BPK.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2019, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Kinerja sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Manusia maupun Sarana Prasarana yang menunjang peningkatan kinerja;
2. Meningkatkan Kecermatan Perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai Sasaran dan Tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Penyelenggaraan Tugas.

**BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAB. BENGKALIS
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016**



BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ, SE, MM